



# LAKIP 2025

## KEC. SUNGAI TABUKAN

FEBRUARI 2026

## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Tabukan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2023-2026 dan merupakan masa transisi untuk Renstra 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Tabukan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja di Kecamatan Sungai Tabukan. Kinerja Kecamatan Sungai Tabukan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Sungai Tabukan Tahun 2025. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena keberhasilan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan aktif segenap komponen terkait sebagai bagian integral dari suksesnya pembangunan di wilayah Kecamatan. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Tabukan ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran Aparatur Sipil Negara dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Sungai Tabukan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Sungai Tabukan secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance, dan Clean

Sungai Tabukan, Februari 2026

Camat Sungai Tabukan,

FAHRIADI, S.Sos, M.I.P

NIP. 198105172006041009

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	
DAFTAR TABEL .....	
DAFTAR LAMPIRAN .....	
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN .....	2
C. HAL-HAL YANG BERPENGARUH TERHADAP TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	10
D. LANDASAN HUKUM.....	10
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
BAB II.....	12
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .....	12
A. RENCANA STRATEGIS .....	12
B. RENCANA KINERJA .....	13
C. PERJANJIAN KINERJA.....	21
BAB III.....	27
AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025.....	27
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	50
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	50
BAB IV .....	53
PENUTUP.....	53

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data PNS Kecamatan Sungai Tabukan	.....	8
Tabel 1.2	Jumlah dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia	.....	9
Tabel 2.1	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Yang Di Evaluasi	.....	13
Tabel 2.2	Rencana Kerja Keuangan Kecamatan Sungai Tabukan	.....	17
Tabel 3.1	Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Kinerja Strategis 2023-2026	.....	27
Tabel 3.2	Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Kinerja Strategis 2025-2029	.....	28
Tabel 3.3	Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Kinerja Program	.....	28
Tabel 3.4	Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Sub Kegiatan	.....	29
Tabel 3.5	Analisis Sasaran Strategis 1	.....	33
Tabel 3.6	Nilai SAKIP Tahun 2025 dan perbandingan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	.....	24
Tabel 3.7	Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2023-2026	.....	29
Table 3.8	Analisis Sasaran Strategis 2	.....	35
Tabel 3.9	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2023-2026	.....	36
Tabel 3.10	Analisis Sasaran Strategis 3	.....	41
Tabel 3.11	Analisis Sasaran Strategis 1 Renstra 2025-2029	.....	42
Tabel 3.12	Analisis Sasaran Strategis 2 Renstra 2025-2029	.....	45
Tabel 3.13	Program dan Indikator Kinerja Pemerintah kecamatan	.....	45
Tabel 3.14	Realisasi Program Kinerja Pemerintah kecamatan	.....	46
Tabel 3.15	Analisis Pendapatan Asli daerah Realisasi Keuangan Kecamatan Sungai	.....	49
Tabel 3.16	Tabukan	.....	50

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Perjanjian Kinerja Camat

## **Bab I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *good governance dan Clean* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dan didasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang di atas, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh instansi masing-masing. Pertanggungjawaban dimaksud adalah berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja yang disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka upaya penyempurnaan mekanisme pertanggungjawaban pemerintah sebagai pengelola sumber-sumber publik kepada masyarakat sebagai pemilik sumber-sumber publik

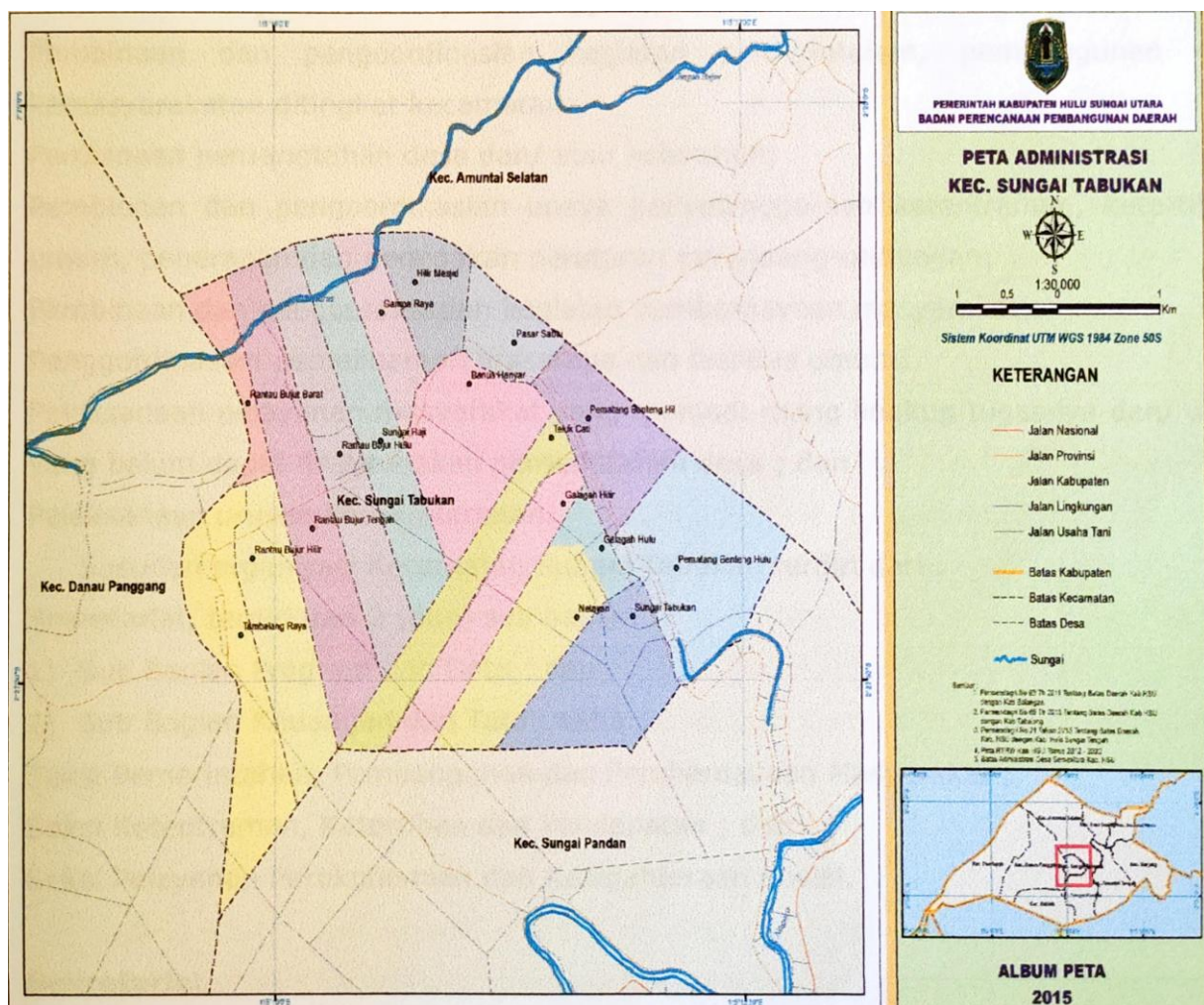
tersebut, maka salah satu upaya penyempurnaan penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah tersebut adalah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

**B. Gambaran Umum Kecamatan**

Kecamatan Sungai Tabukan adalah satu Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara , yang dibentuk pada tahun 2008 sebagai pemekaran dari Kecamatan Sungai Pandan

Kedudukan ibu kota Kecamatan Sungain Tabukan adalah di Desa Banua Hanyar dengan jarak dari Kabupaten Hulu sungai Utara sejauh 10 Km.

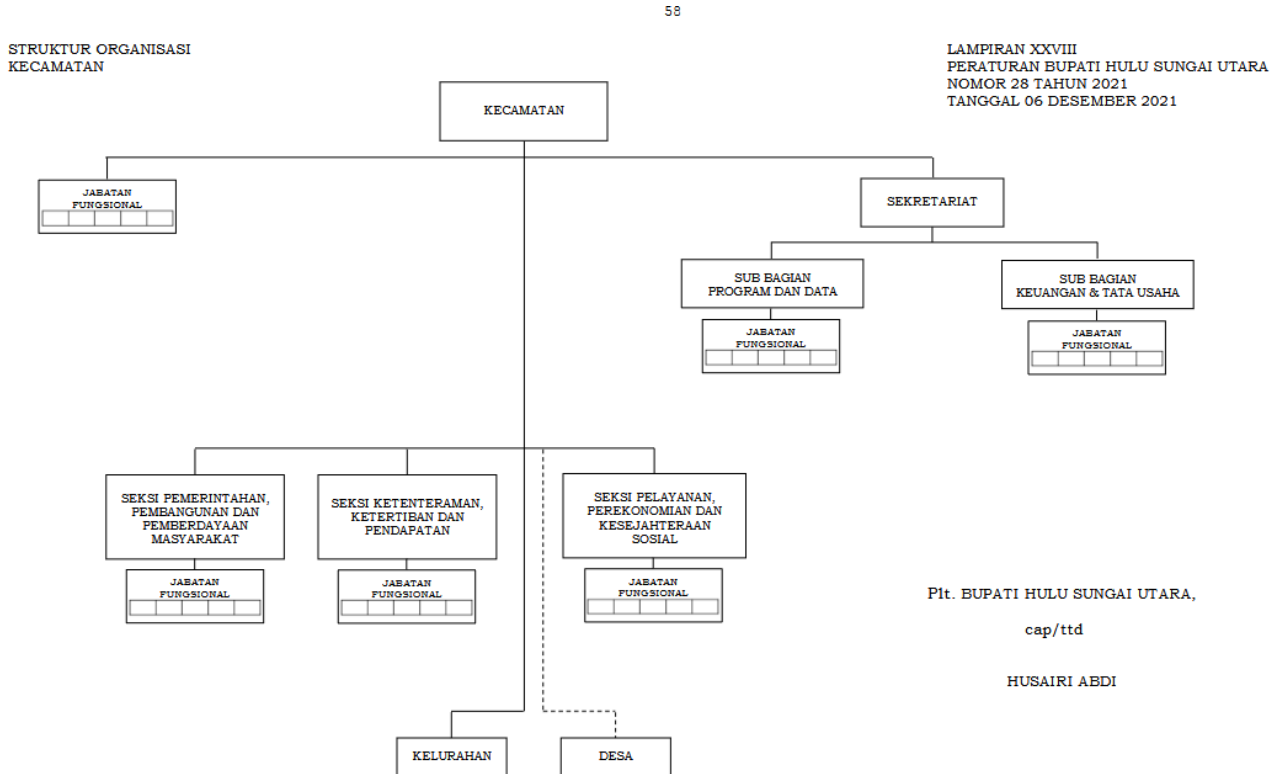
Adapun batas wilayah Kecamatan Sungai Tabukan adalah sebagai berikut:



- Utara : Kecamatan Amuntai Selatan
- Timur : Kecamatan Amuntai Selatan
- Selatan : Kecamatan Sungai Pandan
- Barat : Kecamatan Danau Panggang

Dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan public di Kecamatan Sungai Tabukan didukung oleh 17 Desa.

### Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi



- a. Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi: menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perbup;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

- 1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
  - b. pembinaan dan pengoordinasian kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan;
  - c. pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - d. pembinaan dan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. pembinaan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
  - g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; dan pelaksanaan urusan kesekretariatan

(3) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
  1. Sub Bagian Program dan Data; dan
  2. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha.
- b. Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pendapatan;
- d. Seksi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

**a. Sekretariat**

Pada Kecamatan Sungai Tabukan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada camat. Sekretaris camat mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan kesekretariatan dalam urusan program dan data, keuangan dan tata usaha. Dalam melaksanakan Tugas Pokok Sekretaris Camat menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana sekretariat;
- penyelenggaraan urusan program
- penyelenggaraan urusan data
- penyelenggaraan urusan keuangan; dan
- penyelenggaraan urusan tata usaha;

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

**Sekretariat Kecamatan terdiri dari 2 (dua) sub bagian :**

(1) Sub Bagian Program dan data

Sub Bagian Program dan Data merupakan jabatan structural eselon IV.b atau jabatan pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris kecamatan. Kepala Sub Bagian Program dan Data mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan Urusan Program dan Data. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Program dan Data menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Program dan Data Kecamatan;
- Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program dan Data Kecamatan
- Penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggung jawaban penyelenggaraan Program dan Data Kecamatan ;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha

Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha merupakan jabatan structural eselon IV.b atau jabatan pengawas dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris Kecamatan. Kepala Sub Bagian keuangan dan Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan dan Tata Usaha;
- Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Keuangan & Tata Usaha
- Penyusunan, pengolahan dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Keuangan dan Tata Usaha;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya

**b. Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.**

Merupakan jabatan struktur eselon IV.a atau jabatan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada camat. Kepala Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Tugas Pokok membantu camat dalam melaksanakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemerintahan , Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Desa;
- Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- Penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- Penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- Pembinaan dan pengorganisasian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan;
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dalam urusan pemerintahan , pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pendapatan**

Merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada camat . Kepala seksi Ketenteraman , Ketertiban dan pendapatan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan urusan pembinaan ketenteraman , ketertiban dan pendapatan . Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala seksi Ketenteraman , Ketertiban dan pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan program dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta pendapatan
- Pembinaan dan pengorganisasian upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, penerapan dan penegakan praturan perundang-undangan
- Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dalam urusan ketenteraman , ketertiban dan pendapatan
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan dalam urusan ketenteraman, ketertiban dan pendapatan

- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan peningkatan Pendapatan asli daerah
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan trantibum linmas dan pendapatan
- Penyelenggaraan pembinaan pendapatan desa
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah desa dalam urusan ketentraman ketertiban dan pendapatan
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan dalam urusan seksi ketentraman ketertiban dan pendapatan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya

**d. Seksi pelayanan, perekonomian dan kesejahteraan sosial**

Merupakan jabatan struktural Eselon IVA atau jabatan pengawas dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada camat. Kepala seksi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan urusan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok kepala Seksi Pelayanan, Perekonomian Dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan Program Pelayanan, Perekonomian Dan Kesejahteraan Sosial
- Penyusunan program Indeks Kepuasan Masyarakat Atau (IKM)
- Penyusunan program penanganan unit pengaduan masyarakat
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dalam pusat pelayanan perekonomian dan kesejahteraan sosial
- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan dalam urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya Jumlah personalia dan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Data PNS Kecamatan Sungai Tabukan

## Daftar nama pegawai Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025 :

NO	NAMA	PANGKAT	GOLONGAN DAN RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN	CATATAN
1	Fahriadi, S.Sos, M.I.P NIP .19810517 200604 1 009	Pembina	IV.a	Camat	Strata 2	
2	Chairul Fadhli,SE NIP 19790713 201001 1 014	Penata TK I	III.d	Sekretaris	Strata 1	
3	Abdul Khalik, S.Sos NIP. 19690708 199003 1 007	Penata Tk. I	III.d	Kasi Trantib & Pendapatan	Strata 1	
4	Arazi Rahman, SH NIP. 19850413 201503 1 003	Penata	III.c	Kasi Pemerintahan & PPM	Strata 1	
5	Normaulida, S.Pd NIP 19890801 201503 2 004	Penata	III.c	Kasi Pelayanan, Perekonomian & Kessos	Strata 1	
6	Budiman Adi Putera, S.Ak NIP. 19931005 201903 1 013	Penata Muda Tk. I	III.b	Kasubag Program & Data	Strata 1	
7	Muliadi Hapani, S.AP NIP. 19800209 200801 1 010	Penata Muda Tk. I	III.b	Kasubag Keuangan & TU	Strata 1	
8	Muhammad Rifani, S.AP NIP.19990504 202505 1 002	Penata Muda	III.a		Strata 1	CPNS
9	Muhammad Iqbal, S.AP NIP 20010617 202505 1 002	Penata Muda	III.a		Strata 1	CPNS
10	Eugynia Jessica Virgynia Rahman, S.Kom	Penata Muda	III.a		Strata 1	CPNS
11	Ahmadi Rahmat, A.Md NIP. 198611142019031008	Pengatur Tk I	II.d	Pengelola Kepegawaiaan	Diploma 3	
12	Ardiansyah NIP. 197409032007011022	Juru Tk. I	I.d	Juru Pungut Retribusi	SD	

Tabel 1.2 Jumlah dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)
1	Jumlah Pegawai	12
2	Tingkat Pendidikan	
	▪ SD	1
	•SLTP	0
	•SLTA	0
	•DI/D II	0
	•D III	1
	•D IV	0
	•S1	9
	• S2	1
3	Pangkat dan Golongan	
	■ Pembina Tk.I ( IV/b )	0
	■ Pembina ( IV/a )	1
	■ Penata Tk. I ( III/d )	2
	■ Penata ( III/c )	2
	■ Penata Muda Tk. I ( III/b )	2
	■ Penata Muda ( III/a )	3
	■ Pengatur Tk. I ( II/d )	1
	■ Pengatur ( II/c )	0
	■ Pengatur Muda Tk. I ( II/b )	0
	■ Pengatur Muda ( II/a )	0
	■ Juru Tk. I ( I/d )	1
	■ Juru ( I/c )	0
	■ Juru Muda Tk. I ( I/b )	0
	■ Juru Muda ( I/a )	0

Dari tabel di atas, jumlah pegawai yang bekerja pada Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tingkat pendidikan Strata Dua (S2) sebanyak 1 Orang, Strata S a t u (S1) sebanyak 9 Orang , pendidikan Diploma 3 (D3) sebanyak 1 orang, dan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1 Orang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing–masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan, petunjuk dan menilai kinerja bawahannya.

### **C. Hal-Hal yang berpengaruh terhadap Tugas pokok dan fungsi**

#### a. Kekuatan.

- Anggaran sesuai dengan perencanaan.
- Pendidikan ASN didominasi Pendidikan Tinggi
- Sumberdaya Penujangan berupa Peralatan Kantor Cukup Memadai

#### b. Kelemahan

- Keterbatasan Jumlah Pegawai PNS/ASN
- Di awal tahun beberapa jabatan masih diisi Pelaksana Tugas (Plt)
- Masih adanya ASN yang kurang kompeten dalam bidang tugasnya
- Masih adanya ASN yang kurang disiplin dan tidak memahami Tupoksinya sehingga tugas yang diberikan tidak bisa dilaksanakan sesuai yang diharapkan
- Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi

#### c. Peluang

- Fungsi dan kedudukan desa
- Otonomi Daerah
- Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Terciptanya forum koordinasi

#### d. Tantangan

- Cepatnya Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

### **D. Landasan Hukum**

Lakip Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu sungai Utara ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2016 tentang pemerintahan daerah
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pengembangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten atau Kota

5. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
7. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat daerah
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penyajian Penyajian laporan akuntabilitas ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menyajikan Latar Belakang, Gambaran Umum Organisasi, Aspek Strategik Organisasi, Landasan Hukum Dan Sistematika Penyusunan.

##### **BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Menguraikan secara singkat mengenai Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja.

##### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan pengukuran capaian kinerja, serta analisis capaian kinerja dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

##### **BAB IV. PENUTUP**

Menguraikan simpulan dari tinjauan umum dan khusus tentang keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kinerja, serta berbagai penyebab utama dari permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja serta strategi pemecahan masalah.

#### **LAMPIRAN**

## **Bab II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

##### **1. Tujuan**

Tujuan yang diinginkan dari Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026 pada dasarnya adalah memberikan kemudahan pelayanan publik yang prima dan professional dengan asas transparansi, efisiensi, sinkronisasi, dan integrasi bagi semua pihak guna mendukung upaya kesejahteraan bagi masyarakat di masa-masa mendatang, yang didukung oleh peningkatan Kualitas SDM aparatur, jumlah Personil serta infrastruktur yang terintegrasi pada Kecamatan Sungai Tabukan.

Tujuan pembangunan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk 4 (Empat) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan professional
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
3. Menciptakan kehidupan sosial dan keagamaan yang kondusif
4. Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah bagi aparat dan masyarakat

##### **2. Sasaran**

Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- c. Meningkatnya fasilitas pelayanan sosial dan keagamaan

##### **3. Program**

Program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## B. RENCANA KINERJA

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026 diperlukan adanya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta target yang ingin dicapai dengan target anggaran, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Yang Di Evaluasi**

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi
1	2	3
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>100%</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Kec. Sei. Tabukan)	100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	12 Laporan

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi
1	2	3
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Kec. Sei. Tabukan)	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Laporan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase suksesnya kegiatan pemberdayaan desa</b>	<b>100%</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12 Laporan
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase pelaksanaan monitoring pemilukada di kecamatan</b>	<b>100%</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum (kec. sei tabukan)	100%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	12 Laporan
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase tercapainya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	273 Dokumen

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi
1	2	3
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	17 Dokumen
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP meningkat</b>	<b>100%</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabukan)	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabukan)	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	210 Orang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	12 Laporan
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabukan)	100%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	1 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabukan)	100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	1 Orang

<b>Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)</b>	<b>Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi</b>
1	2	3
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabukan)	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan SKPD penyelenggaraan rapat koordinasi	38 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabukan)	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	19 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Kec. Sungai tabukan)	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Kec. Sungai tabukan)	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit

Adapun Rencana Kerja Keuangan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut

**Tabel 2.2 Rencana Kerja Keuangan Kecamatan Sungai Tabukan**

<b>Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)</b>	<b>Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi</b>
1	2	3
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>71.985.000</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Kec. Sei. Tabukan)	4.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	4.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Kec. Sei. Tabukan)	67.985.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	67.985.000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase suksesnya kegiatan pemberdayaan desa</b>	<b>169.693.819</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	<b>169.693.819</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	<b>169.693.819</b>

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi
1	2	3
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase pelaksanaan monitoring pemelukada di kecamatan</b>	<b>15.550.000</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum (kec. sei tabukan)	<b>15.550.000</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	<b>15.550.000</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>49.550.000</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		<b>49.550.000</b>
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<b>25.750.000</b>
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<b>23.800.000</b>
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>78.083.000</b>

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi
1	2	3
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase tercapainya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	<b>78.083.000</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	63.908.000
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	14.175.000
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP meningkat</b>	<b>3.101.126.985</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabukan)	52.926.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	52.176.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	750.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabukan)	2.616.821.983
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2.616.321.985
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	350.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	150.000

<b>Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)</b>	<b>Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi</b>
1	2	3
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabukan)	13.600.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	13.600.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabukan)	5.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	5.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabukan)	66.223.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	19.871.300
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6.969.600
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan SKPD penyelenggaraan rapat koordinasi	39.383.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabukan)	127.337.500
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	127.337.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabukan)	92.499.600
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.870.800
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72.628.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Sungai tabukan)	126.718.000

<b>Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)</b>	<b>Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi</b>
1	2	3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	77.040.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3.250.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	46.028.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	400.000

### C. PERJANJIAN KINERJA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (MURNI)**  
**KANTOR CAMAT SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : FAHRIADI, S.Sos. M.I.P**  
**Jabatan : CAMAT SUNGAI TABUKAN**

**Selanjutnya disebut pihak pertama**

**Nama : Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM**  
**Jabatan : PJ. BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

**Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai, Januari 2025

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM**

**FAHRIADI, S.Sos. M.I.P**  
**NIP. 19810517 200604 1 009**

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KECAMATAN SUNGAI TABUKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP kecamatan	BB
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%
3	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Sosial dan Keagamaan	Persentasi Penurunan Konflik Sosial Dan Keagamaan di Kecamatan	100%
	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Program penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Persentasi Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	100%
2	Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Persentasi Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%
3	Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Persentasi Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100%
5	Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Persentasi Tercapainya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.981.387.804,-	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 11.400.000,-	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Rp 71.074.000,-	
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 4.025.000,-	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 50.750.000,-	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 20.525.000,-	
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 3.139.161.804</b>	

Amuntai, Januari 2025

PJ. BUPATI HULU SUNGAI UTARA

CAMAT SUNGAI TABUKAN

Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM

FAHRIADI, S.Sos. M.I.P  
NIP. 19810517 200604 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN**

Alamat: Jl. Tiga Desember Rt. 002 No.34 Banua Hanyar Kecamatan Sungai Tabukan  
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71455  
e-mail : [kec-seitabukan@hulusungaiutara.go.id](mailto:kec-seitabukan@hulusungaiutara.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAHRIADI, S.SOS.,M.I.P  
Jabatan : CAMAT

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. SAHRUJANI  
Jabatan : BUPATI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

HULU SUNGAI UTARA, NOVEMBER 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. SAHRUJANI

FAHRIADI, S.SOS.,M.I.P  
NIP 198105172006041009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN  
HULU SUNGAI UTARA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>TUJUAN</b>		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 INDEKS
	<b>SASARAN</b>		
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, Kinerja Perangkat Daerah dan Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77 NILAI
		Persentase Sumberdaya Penunjang Pelayanan yang Memenuhi Standar	100 Persen
3	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	100 Persen
4	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pelayanan (PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK)	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	100 Persen
5	Meningkatnya Fasilitasi pemberdayaan masyarakat (PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100 Persen
6	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM)	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keamanan	100 Persen
7	Meningkatnya Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum (PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM)	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen
8	Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan (PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA)	Persentase Keselarasan antara APBDES dengan RKPDES	100 Persen

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	71.985.000
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	169.693.819
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.550.000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.550.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	78.083.000
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.101.126.985

HULU SUNGAI UTARA, NOVEMBER 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

CAMAT

H. SAHRUJANIFAHRIADI, S.SOS.,M.I.P  
NIP 198105172006041009

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perseorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Kecamatan Sungai Tabukan selaku pengemban amanah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja Kecamatan Sungai Tabukan.

Tahun anggaran 2025 merupakan tahun Transisi antara Renstra 2023-2026 dengan Renstra 2025-2029, maka dalam hal ini penyajian LAKIP Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menyajikan Sasaran berdasarkan Renstra 2023-2026 dan Sasaran berdasarkan Renstra 2025-2029.

#### A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Kinerja Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan (PK). Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Camat Sungai Tabukan merupakan kinerja Tahun ke -3 pada Periode Renstra 2023-2026. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 berdasarkan Renstra 2023-2026 dan Pencapaian Kinerja Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

##### 1. Capaian Kinerja Strategis Tahun 2023-2026

**Tabel 3.1 Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Kinerja Strategis**

No.	Tujuan & Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran	2025		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	73	90	Nilai berdasarkan LHE Inspektorat S.D Triwulan III
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100 %	88,2	Terdapat 15 Desa dari 17 Desa yang Mengajukan Usulan Pada Musrenbang di Kecamatan
3	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Sosial dan Keagamaan	Persentase Penurunan Konflik Sosial dan Keagamaan di Kecamatan	100 %	-	Tidak ada Konflik sosial dan keagamaan yang tercatat di Kecamatan Sungai Tabukan

## 2. Capaian Kinerja Strategis Tahun 2025-2029

**Tabel 3.2 Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Kinerja Strategis**

No.	Tujuan & Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran	2025		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, Kinerja Perangkat Daerah dan Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	90	Nilai berdasarkan LHE Inspektorat S.D Triwulan III
		Persentase Sumberdaya Penunjang Pelayanan yang Memenuhi Standar	100 %	100%	
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	100 %	100%	

## 3. Capaian Kinerja Program

**Tabel 3.3 Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Kinerja Program**

No.	Program	Indikator	2025			
			Target	Satuan	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAH DAERAH (%)	100	%	95	95
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT (%)	100	%	100	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE SUKSESNYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	100	%	100	100
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	%	100	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	%	100	100
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE TERCAPAINYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	%	100	100

## 4. Capaian Kinerja Sub Kegiatan

Adapun Gambaran Capaian Indikator Sub Kegiatan Berdasarkan ke 2 Renstra yaitu 2023-2026 & 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan**

No.	Sub Kegiatan	Indikator	2025				
			Target	Satuan	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Ket
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	5	100	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	6	100	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210	Orang	186	88,57	Jumlah Pegawai Tersedia Pada Bulan Jan-Apr Tidak Mencapai Angka Perhitungan Jumlah Pegawai Pada Saat perencanaan
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	5	100	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	12	100	

N o.	Sub Kegiatan	Indikator	2025				
			Targe t	Satuan	Realisa si	Tingka t Capaian (%)	Ket
6	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Laporan	1	100	
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang	1	100	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	2	50	Pengadaan Berjalan Maksimal, Hanya Jumlah Pengiriman Paket yang semula direncanakan akan dilaksanakan Pengadaan setiap triwulan, tapi pada tahun berjalan pengadaan dapat dilakukan cukup dua kali pengadaan
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	2	50	Pengadaan Berjalan Maksimal, Hanya Jumlah Pengiriman Paket yang semula direncanakan akan dilaksanakan Pengadaan setiap triwulan, tapi pada tahun berjalan pengadaan dapat dilakukan cukup dua kali pengadaan
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38	Laporan	38	100	

No.	Sub Kegiatan	Indikator	2025				
			Target	Satuan	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Ket
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19	Unit	19	100	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	32	88,89	Kurang Anggaran untuk pembayaran Tagihan listrik, sehingga di catat sebagai utang
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	100	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	6	100	
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	10	100	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	3	100	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	1	50	Pagu tersedia hanya untuk 1 Unit sarana prasarana
18	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	100	
19	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	laporan	12	100	

N o.	Sub Kegiatan	Indikator	2025				
			Targe t	Satuan	Realisa si	Tingka t Capaian (%)	Ket
20	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	laporan	12	100	
21	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	100	
22	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	Orang	50	100	
23	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokume n	1	100	
24	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	273	Dokume n	273	100	
25	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17	Dokume n	17	100	

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja berikut menggambarkan Sasaran Strategis berdasarkan Renstra 2023-2026 dan Renstra 2025-2029. Adanya masa transisi yang sebelumnya Kab. Hulu Sungai Utara dipimpin oleh Penjabat (Pj) dan selanjutnya kepala daerah baru, maka LAKIP tahun 2025 akan menjelaskan sasaran Strategis di kedua Masa pemerintahan tersebut, yang termuat dalam Perjanjian Kerja ( PK Murni) dan Perjanjian kinerja (PK Perubahan).

Dari sasaran Strategis dari Kedua Renstra tersebut ada sasaran atau indikator yang memiliki kesamaan. Sasaran dan Indikator tersebut tetap akan di analisis secara terpisah, agar analisis dapat membedakan periode renstra masing-masing.

### a. Analisis sasaran strategis berdasarkan Renstra 2023-2026

**Tabel 3.5 Analisis Sasaran Strategis 1 (Renstra 2023-2026)**

<b>Sasaran Strategis 1</b>					
<b>Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan</b>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Nilai Sakip Kecamatan	BB/77	90	116 %	Nilai Sakip Realisasi 2025 masih berdasarkan Nilai SAKIP yang diberikan oleh Inspektorat Pada Triwulan III

Meningkatnya Akuntabelitas dan Kinerja Kecamatan merupakan sasaran strategis yang pengukurannya di tahun 2025 ini merupakan tahun Ketiga periode Renstra 2023-2026. Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah nilai SAKIP Kecamatan. Penilaian SAKIP dilakukan oleh Inspektorat. Hasil penilaian SAKIP Tahun 2025 akan diterima pada Triwulan II Tahun 2026. Adapun Target Nilai Sakip Kecamatan Sungai Tabukan untuk Tahun 2025 ini adalah BB/ dengan skor 77 atau lebih tinggi dari capaian Tahun 2024 yang merupakan Tahun Kedua periode Renstra 2023-2026. Adapun Capaian SAKIP untuk tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Nilai SAKIP Tahun 2025 dan Perbandingan dengan Capaian Tahun sebelumnya**

No	Uraian	2023	2024	2025	2026
1	Nilai Sakip Kecamatan	73,9	75,15	90	-

Mewujudkan birokrasi yang bersih dan professional dalam rangka pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah salah satu focus / tujuan pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam kerangka yang lebih spesifik untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan professional diperlukan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini Kecamatan Sungai Tabukan sebagai unit organisasi yang membidangi Kecamatan Administrasi berusaha melakukan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Menejemen Kinerja Kecamatan Sungai Tabukan serta Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Pemerintah dengan Kebijakan Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan, Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien sesuai peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur(SOP)

**Tabel 3.7 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2023-2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Sungai Tabukan	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Kinerja kecamatan	1. Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan
		Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Pemerintah	2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang Efektif dan Efisien Sesuai peraturan Perundang-undangan
			3. Peningkatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

*Sumber : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2023-2026*

Beberapa Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka Nilai SAKIP meningkat Kecamatan Sungai Tabukan melakukan kegiatan di antaranya ;

1. Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Seperti :
  - a. Tersedianya Dokumen Renstra Kecamatan 2023-2026 & 2025-2029
  - b. Tersedianya Dokumen Renja Tahun 2025 & 2026
  - c. Tersedianya Perjanjian Kinerja & Rencana Aksi Tahun 2025
  - d. Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dalam rangka perencanaan dan pelaporan kinerja ,diantaranya :
  - a. Penandatanganan Perjanjian Kinerja & Pakta Integritas
  - b. Rapat Koordinasi dalam rangka perencanaan Tahun 2026
  - c. Dilaksanakannya Koordinasi Pembuatan Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Aksi Bulanan
  - d. Dilaksanakannya Koordinasi Pelaporan Kinerja
  - e. Dilaksanakannya pembuatan Risk Register dalam rangka kegiatan manajemen Risiko Tahun 2025
  - f. Dilaksanakannya Pembuatan Dokumen Anggaran Responsif Gender
  - g. Rapat Koordinasi /Diskusi Internal Lainnya
3. Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dengan mengikuti kegiatan sebagai berikut:
  1. FGD Penyusunan Renstra
  2. FGD Dokumen ARG

**Tabel 3.8 Analisis Sasaran Strategis 2**

<b>Sasaran Strategis 2</b>				
<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan</b>				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%	88,2%	88,2%

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan diukur dengan persentasi jumlah usulan desa yang di usulkan pada saat musrenbang kecamatan dibagi jumlah desa yang ada di Kecamatan Sungai Tabukan. Setiap usulan desa yang disampaikan pada saat musrenbang menjadi manifestasi /bentuk dari partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa. Pada Tahun 2025 Kecamatan Sungai Tabukan melaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan jumlah desa yang memberikan usulan Desa/masyrakat sebesar 88,2 % atau dari 17 desa yang ada di Kecamatan hanya 15 Desa yang memberikan usulan.

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik ( Good Governance), keterlibatan Masyarakat merupakan kunci dalam rangka mendorong agar setiap kebijakan-kebijakan pemerintah berorientasi terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam Pembangunan. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat menjadi sasaran Strategis Kecamatan Sungai Tabukan selama periode Renstra 2023-2026. Sasaran Strategis ini dicapai dengan beberapa strategi dan kebijakan yaitu :

**Tabel 3.9 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2023-2026**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1. Peningkatan Kepedulian Masyrakat Dalam Membangun Desa
		2. Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa	2. Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa

*Sumber : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2023-2026*

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan merupakan Sasaran Strategis Kecamatan Sungai Tabukan yang diperjanjikan oleh Camat Sungai Tabukan dan tertuang dalam perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Camat dan Bupati Hulu Sungai Utara selaku Kepala Daerah. Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, Pemerintah Kecamatan Sungai Tabukan melalui Seksi Pemerintahan dan PPM melaksanakan kebijakaan 1. Peningkatan Kepedulian Masyarakat Dalam Membangun Desa. 2. Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa

dalam rangka Strategi Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dan Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa.

Beberapa Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Sungai Tabukan melalui Seksi Pemerintahan & PPM diantaranya :

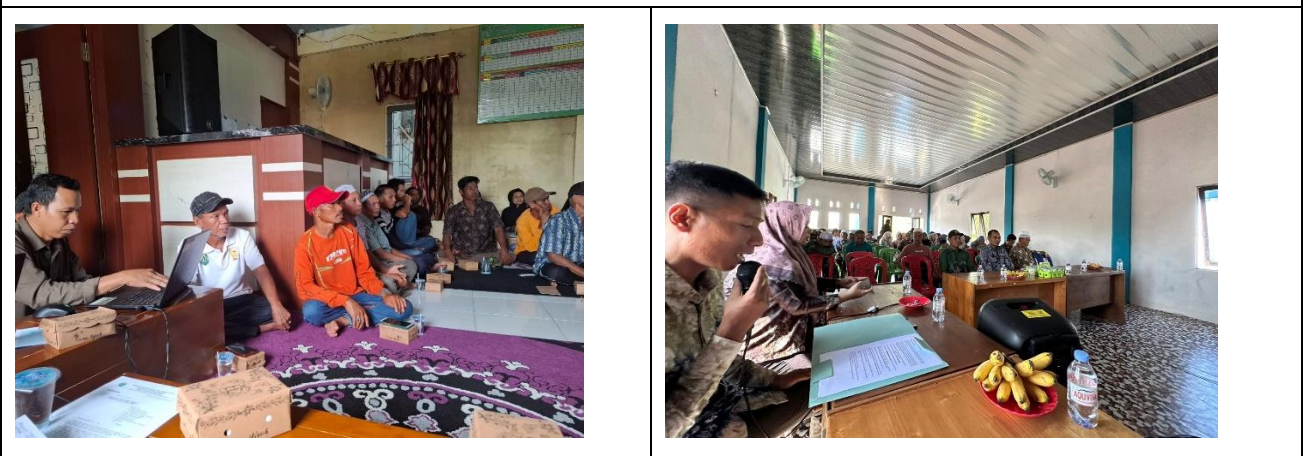
1. Mengikuti Musrenbang Tingkat Desa
2. Melaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan
3. Melaksanakan Kegiatan PKK
4. Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan
5. Bimtek KPM
6. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa
7. Melaksanakan Apel Gabungan Kecamatan Dengan Desa
8. Deklarasi Zero Stunting
9. Lomba Desa
10. Pembinaan Lomba Desa

Adapun Foto- Foto kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Dokumentasi Kegiatan Musrenbang Tk. Kecamatan



2. Dokumentasi Kegiatan Musrenbang Tk. Desa



3. Melaksanakan Kegiatan PKK



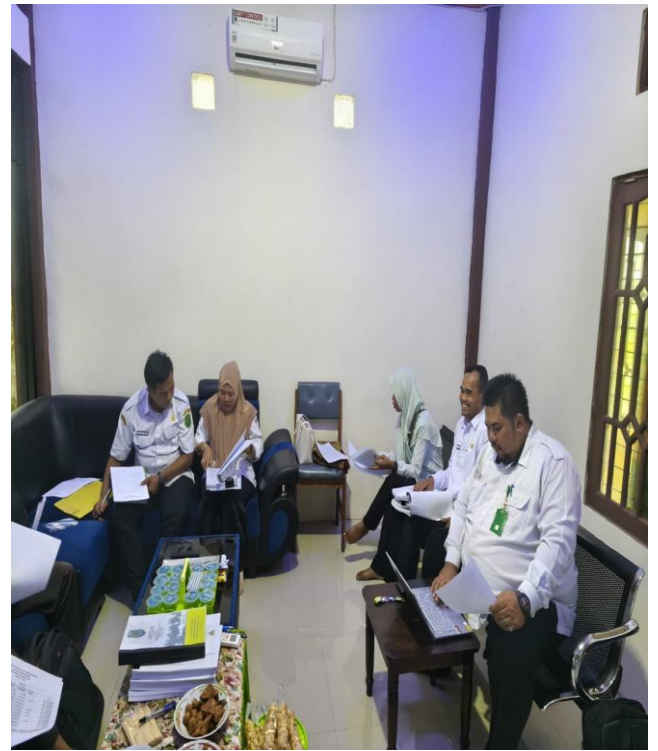
4. Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan



5. Bimtek KPM



6. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa



7. Melaksanakan Apel Gabungan Kecamatan Dengan Desa setiap bulan di Halaman Kecamatan



8. Deklarasi Zero Stunting



9. Mengadakan Perombaan Tingkat Desa



10. Pembinaan Lomba Desa



Tabel 3.10 Analisis Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3				
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Sosial dan Keagamaan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
3	Persentasi Penurunan Konflik social dan Keagamaan di Kecamatan	100%	-	-

Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Sosial & Keagamaan yang diukur dengan indikator Penurunan Konflik social dan Keagamaan di Kecamatan, maka pada tahun 2025 berdasarkan tabel diatas Kecamatan Sungai Tabukan tidak ada mencatat atau tidak ada konflik

sosial yang teradministrasi dikecamatan.

**b. Analisis sasaran strategis berdasarkan Renstra 2025-2029**

**Tabel 3.11** Analisis Sasaran Strategis 1 Renstra 2025-2029

<b>Sasaran Strategis 1</b>					
<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, Kinerja Perangkat Daerah dan Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan</b>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB/77	90	116%	1. Indikator sama dengan Renstra 2023-20261
2	Persentase Sumberdaya Penunjang Pelayanan yang Memenuhi Standar	100%	85%	85%	

Sasaran Strategis 1 berupa meningkatnya Tata kelola, Kinerja Perangkat Daerah dan Sumberdaya Penunjang Pelayanan Kecamatan memiliki Dua Indikator Kinerja, yaitu 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Indikator ini sama dengan indikator Renstra 2023-2026 yang mana berfokus pada pencapaian Kualitas Manajemen Organisasi Pemerintah. Pemenuhan indikator ini sudah dijelaskan dan diungkapkan pada Sasaran Strategis 1 Renstra 2023-2026.

Selanjutnya Sasaran Strategis 1 berdasarkan Renstra 2025-2029 ini terdapat 1 Tambahan Indikator berupa Persentase Sumberdaya Penunjang Pelayanan yang memenuhi Standar. Indikator ini berupaya mengukur tingkat pemenuhan Sumberdaya Penunjang Pelayanan yang memenuhi Standar melalui Survey Internal yang dilakukan.

Adapun kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2025 dalam rangka pemenuhan sumberdaya penunjang pelayan kecamatan yang memenuhi standar adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Gedung Pelayanan
2. Rehabilitasi Halaman Parkir Pelayanan
3. Pengadaan PC, AC dan Printer
4. Pemenuhan Sarana Disabilitas
5. Pembuatan Pamphlet Pendukung Pelayanan.

Berikut Foto atau Dokumentasi Kegiatan Pemenuhan Sumberdaya Penunjang Pelayanan sebagaia Berikut :

1. Rehabilitasi Gedung /Ruang Pelayanan



2. Rehabilitasi Halaman Parkir Pelayanan



### 3. Pengadaan PC, AC dan Printer



### 4. Pemenuhan Sarana Disabilitas



### 5. Pembuatan Pamphlet Pendukung Pelayanan



**Tabel 3.12** Analisis Sasaran Strategis 2 Renstra 2025-2029

<b>Sasaran Strategis 2</b>					
<b>Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan</b>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	100 %	100%	100%	

Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan diukur dengan indikator Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan. Kinerja Pemerintah Kecamatan adalah Kinerja yang Tugas dan Fungsi Kecamatan yang tergambar dalam Program dan Indikator selama 5 Tahun Renstra Kecamatan di antaranya :

**Tabel 3.13** Program dan Indikator Kinerja Pemerintah kecamatan

No.	Program	Indikator	2025-2029	
			Target	Satuan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT (%)	100	%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE SUKSESNYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	100	%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE TERCAPAINYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	%

Adapun capaian masing-masing Program dan Indikator untuk Tahun 2025 sebagai berikut

:

**Tabel 3.14** Realisasi Program Kinerja Pemerintah kecamatan

No.	Program	Indikator	2025			
			Target	Satuan	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT (%)	100	%	100	100
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE SUKSESNYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	100	%	100	100
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	%	100	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	%	100	100
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE TERCAPAINYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	%	100	100

Adapun kegiatan langsung dalam rangka suksesnya pelaksanaan kinerja Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Dalam Rangka Sukses Administrasi Pelayan masyarakat. Kecamatan Sungai Tabukan melalui PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan) berusaha memberikan Pelayanan Sesuai standar menpan yang tertuang dalam peraturan Menpan. (Foto telah dismapaikan pada penjelasan sebelumnya)
2. PATEN Kecamatan Sungai Tabukan melalui Kasi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial memberkan fasilitasi berupa kegiatan kemasyarakatan seperti Kegiatan Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan/Puskesmas, Kegiatan Pasar Murah oleh Dinas Pridagkop, Pembagian Beras Bulog dan lain-lain. Foto Kegiatan sebagai berikut:

## Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah



## Fasilitasi Kegiatan Kesehatan



3. Dalam rangka sukses pemberdayaan , kepala seksi pemerintahan & PPM melakukan kegiatan berupa PKK Tematik, Lomba Tingkat Desa, mengikuti lomba/ kegiatan kab, Pelaksanaan deklarasi Zero Stunting, melaksanakan /mengikuti Rembuk stunting Tingkat Kecamatan dan desa. (Foto Kegiatan Sudah Dilampirkan Pada Penjelasan Sebelumnya)
4. Dalam rangka terlaksananya koordinasi ketentaraman dan ketertiban umum, pemerintah kecamatan melalui Kasi Trantib dan Pendapatan melakukan monitoring Kegiatan Keamanan dan Ketertiban pada 17 Desa Dikecamatan Sungai Tabukan. Selain itu melalui Kasi Trantib dan pendapatan dilakukan fasilitasi penanganan dan pendataan kegiatan kebencanaan seperti kebakaran, banjir dan lainnya. Foto Kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Monitoring Ke Desa Oleh Kasi Trantib



5. Dalam rangka suksesnya urusan pemerintahan umum pemerintah Kecamatan melaksanakan kegiatan berupa Pembinaan wawasan kebangsaan melalui kegiatan pelaksanaan HUT RI Tahun 2025 dan Pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan : Kegiatan Terlampir

Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Melalui Perayaan HUT RI



## Kegiatan Forkumpimcam



6. Dalam Rangka tercapainya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa , kecamatan sungai Tabukan melalui Kasi Pemerintahan & PPM melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan desa , melaksanakan musrenbang dan kegiatan fasilitasi pemerintahan desa lainnya. (Foto telah disampaikan pada penjelasan sebelumnya)

### Pengukuran Kinerja yang berkaitan dengan pendapatan Asli Daerah

Tabel 3. 10 Analisis Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	2025		2024	%	SELISIH	% SELISIH
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI			
1	Retribusi Pelayanan Pasar	Rp 10.000.000,00	Rp 10.788.000,00	Rp 6.784.000,00	107,9 %	Rp 4.000.000,00	58,96%

Realisasi Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah sebesar Rp 10.788.000,00 atau 107,9 % dari target Pendapatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Kecamatan Sungai Tabukan sebesar Rp 10.000.000,00.

## AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tabel 3. 16 Realisasi Keuangan Kecamatan Sungai Tabukan  
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,101,126,985	1,925,290,256	62,08
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52,926,000	49,734,290	93,97
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52,176,000	49,074,290	94,06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	750,000	660,000	88
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,616,821,985	1,473,450,185	56,31
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,616,321,985	1,473,330,185	56,31
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	350,000	Rp -	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	150,000	120,000	80
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	13,600,000	13,540,000	99,56
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	13,600,000	13,540,000	99,56
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,000,000	5,000,000	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5,000,000	5,000,000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66,223,900	63,651,660	96,12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,871,300	19,038,210	95,81
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,969,600	6,157,450	88,35
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39,383,000	38,456,000	97,65
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127,337,500	115,965,501	91,07
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127,337,500	115,965,501	91,07
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,499,600	91,138,370	98,53

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19,870,800	18,898,370	95,11
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72,628,800	72,240,000	99,46
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126,718,000	112,810,250	89,02
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77,040,000	72,070,125	93,55
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,250,000	1,690,000	52
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46,028,000	38,650,125	83,97
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400,000	400,000	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>71,985,000</b>	<b>21,375,000</b>	<b>29,69</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4,000,000	3,970,000	99,25
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4,000,000	3,970,000	99,25
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	67,985,000	17,405,000	25,60
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	67,985,000	17,405,000	25,60
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>169,693,819</b>	<b>113,832,880</b>	<b>67,08</b>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	169,693,819	113,832,880	67,08
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	169,693,819	113,832,880	67,08
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>15,550,000</b>	<b>13,860,000</b>	<b>89,13</b>
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15,550,000	13,860,000	89,13

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15,550,000	13,860,000	89,13
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	49,550,000	48,970,000	98,83
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	49,550,000	48,970,000	98,83
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25,750,000	25,470,000	98,91
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23,800,000	23,500,000	98,74
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	78,083,000	71,051,000	90,99
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78,083,000	71,051,000	90,99
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	63,908,000	57,526,000	90,01
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14,175,000	13,525,000	95,41
		<b>Rp3.485.988.804,00</b>	<b>Rp 2.194.379.136,00</b>	<b>62,95</b>

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat sebagai media akuntabilitas yang juga berfungsi sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Disamping sebagai alat perbaikan *governance* dan manajemen di lingkungan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, LAKIP ini diharapkan juga berfungsi sebagai alat belajar untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan mandat secara lebih akuntabel.

Berdasarkan analisa dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2025, yaitu :

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Tabukan sudah berjalan lebih baik, walaupun tidak dipungkiri masih terdapat kelemahan atau pelaksanaan dan pencapaian tidak sesuai dengan yang direncanakan.
- b. Penetapan indikator Kinerja pada tahun 2025 mengacu kepada Renstra Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2023 – 2026 & 2025-2029, Indikator Kerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Tabukan Periode 2023-2026 & 2025-2029 dan Penetapan Kinerja Kecamatan Sungai Tabukan Tahun Murni dan Perubahan

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akuntabilitas Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2024, antara lain :

1. Keterbatasan Pejabat/ ASN di Kecamatan Sungai Tabukan
2. Masih lemah nya Komitmen dan pemahaman pelaksanaan SAKIP

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penambahan ASN atau Karyawan / atau Pejabat untuk menduduki posisi jabatan yang masih kosong
2. Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur / Diklat peningkatan kualitas Aparatur

Untuk tahap selanjutnya dengan LAKIP ini diharapkan kepada pihak-pihak terkait dan pengambil keputusan dapat memberikan umpan balik (*feed back*) kepada Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik untuk perbaikan penyusunan LAKIP ini sendiri di masa yang akan datang maupun untuk perbaikan kinerja Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sungai Tabukan, Februari 2026  
Camat Sungai Tabukan,  
  
Entriadi, S.Sos, M.IP  
Pembina  
NIP. 19810517 200604 1 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KANTOR CAMAT SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : FAHRIADI, S.Sos. M.I.P**  
**Jabatan : CAMAT SUNGAI TABUKAN**

**Selanjutnya disebut pihak pertama**

**Nama : Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM**  
**Jabatan : PJ. BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

**Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai, Januari 2025

**Pihak Kedua,**

**Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM**

**Pihak Pertama,**

**FAHRIADI, S.Sos. M.I.P**  
**NIP. 19810517 200604 1 009**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KECAMATAN SUNGAI TABUKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP kecamatan	BB
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%
3	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Sosial dan Keagamaan	Persentase Penurunan Konflik Sosial Dan Keagamaan di Kecamatan	100%
	<b>KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Terselenggaranya Program penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	100%
2	Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%
3	Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100%
5	Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Persentase Tercapainya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.981.387.804,-	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 11.400.000,-	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Rp. 71.074.000 ,-	
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 4.025.000,-	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 50.750.000,-	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 20.525.000,-	
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 3.139.161.804</b>	

PJ. BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM

Amuntai, Januari 2025

CAMAT SUNGAI TABUKAN

FAHRIADI, S.Sos, M.I.P

NIP. 19810517 200604 1 009



## PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

### KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

Alamat: Jl. Tiga Desember Rt. 002 No.34 Banua Hanyar Kecamatan Sungai Tabukan

Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71455

e-mail : [kec-seitabukan@hulusungaiutara.go.id](mailto:kec-seitabukan@hulusungaiutara.go.id)

#### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAHRIADI, S.SOS.,M.I.P

Jabatan : CAMAT

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. SAHRUJANI

Jabatan : BUPATI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

H. SAHRUJANI

HULU SUNGAI UTARA, NOVEMBER 2025

PIHAK PERTAMA

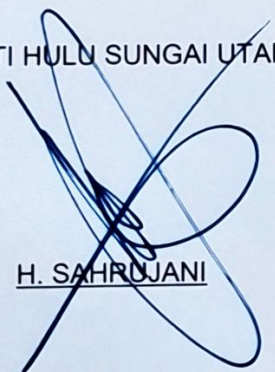
FAHRIADI, S.SOS.,M.I.P  
NIP 198105172006041009

8	Meningkatnya tata kelola pemerintah desa/kelurahan (PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA)	Persentase Keselarasan antara APBDES dengan RKPDES	100 Persen

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	71.985.000
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	169.693.819
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.550.000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.550.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	78.083.000
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.101.126.985

HULU SUNGAI UTARA, NOVEMBER 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA



H. SAHRUJANI

CAMAT



FAHRIADI, S.SOS., M.I.P  
NIP 198105172006041009